

**PENGUATAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES) MELALUI PENDAMPINGAN
PARTISIPATIF DAN TRANSPARANSI DI DESA BABUSSALAM, KECAMATAN
GERUNG, KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Eva Nur Fitriani

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdul Rasyid Lombok Tengah

*email (evanur@gmail.com)

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penguatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) melalui pendekatan pendampingan yang partisipatif dan berbasis transparansi. Studi dilakukan di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pendamping lokal desa dalam proses perencanaan, serta pelibatan masyarakat secara terbuka melalui forum-forum musyawarah, telah meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur desa dalam menyusun dokumen RKPDes yang akuntabel. Selain itu, transparansi dalam penyampaian informasi kepada warga juga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas proses perencanaan. Namun demikian, masih ditemukan tantangan dalam hal keberlanjutan pendampingan dan keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan penguatan sistem pendampingan berkelanjutan dan peningkatan pelatihan teknis bagi aparatur desa.

Kata Kunci: Kapasitas Aparatur Desa, RKPDes, Pendampingan Partisipatif, Transparansi, Desa Babussalam.

Abstract : This study aims to analyze the efforts to strengthen the capacity of village apparatus in preparing the Village Government Work Plan (RKPDes) through participatory and transparency-based assistance approaches. The research was conducted in Babussalam Village, Gerung District, West Lombok Regency. The method used was a descriptive qualitative approach with data collection techniques including observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results showed that active involvement of local village facilitators in the planning process, along with open community participation through deliberation forums, significantly improved the understanding and competence of village officials in preparing accountable RKPDes documents. In addition, transparency in delivering information to residents further strengthens the legitimacy and accountability of the planning process. However, challenges remain in terms of the sustainability of assistance and limitations in human resources. The study recommends strengthening sustainable mentoring systems and improving technical training for village apparatus.

Keywords: Village Apparatus Capacity, RKPDes, Participatory Assistance, Transparency, Babussalam Village.

Article history: Received : 01/03/2024 Approved : 10/04/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jp_m
---	---

Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan nasional, desa memegang peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Salah satu

instrumen penting dalam manajemen pembangunan desa adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penyusunan RKPDDes yang tepat, partisipatif, dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang mengalami kendala dalam penyusunan RKPDDes, baik dari aspek teknis, sumber daya manusia, maupun pelibatan masyarakat. Aparatur desa sering kali belum memiliki kapasitas yang memadai dalam memahami regulasi, teknis penyusunan dokumen, hingga mekanisme perencanaan partisipatif yang sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, dokumen RKPDDes tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan sering hanya bersifat formalitas administratif belaka (Rohman, 2020).

Kondisi tersebut juga tercermin di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Minimnya pelatihan teknis dan terbatasnya pendampingan dari tenaga profesional membuat aparatur desa kesulitan menyusun RKPDDes secara tepat waktu dan berbasis data yang akurat. Selain itu, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam forum-forum perencanaan juga menghambat terciptanya transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam penyusunan RKPDDes.

Pemerintah sebenarnya telah mengatur pentingnya perencanaan desa yang partisipatif dan transparan sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa proses penyusunan RKPDDes harus melibatkan seluruh unsur masyarakat dan didasarkan pada musyawarah desa yang terbuka. Selain itu, pendampingan terhadap desa telah diformalkan melalui keberadaan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang ditugaskan untuk memfasilitasi proses perencanaan hingga penganggaran. Namun dalam pelaksanaannya, pendampingan ini belum berjalan optimal karena berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah pendamping, wilayah kerja yang luas, serta belum semua pendamping memiliki kapasitas fasilitasi yang memadai (Yuliana, 2021).

Dengan melihat realitas tersebut, diperlukan strategi penguatan kapasitas aparatur desa melalui skema pendampingan partisipatif dan berbasis transparansi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis aparatur desa, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik secara aktif serta mendorong budaya tata kelola yang terbuka. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan memastikan bahwa pembangunan desa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.

Penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas model pendampingan partisipatif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, serta bagaimana prinsip transparansi dapat diinternalisasi dalam proses perencanaan pembangunan di tingkat desa, khususnya di Desa Babussalam, sebagai studi kasus yang representatif di wilayah Lombok Barat.

Perencanaan pembangunan desa merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu instrumen utama dalam perencanaan tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES), yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta alokasi anggaran desa. RKPDES yang disusun dengan baik dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam penyusunan RKPDES, terutama terkait dengan kapasitas aparatur desa yang terbatas dalam memahami regulasi, prosedur teknis, serta prinsip partisipatif dan transparansi. Di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan serta kurangnya keterbukaan dalam penyusunan dokumen perencanaan desa. Hal ini dapat berdampak pada rendahnya tingkat akuntabilitas serta efektivitas pembangunan desa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendekatan pendampingan partisipatif dan berbasis transparansi. Pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap mekanisme penyusunan RKPDES, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta membangun sistem yang lebih terbuka dalam pengelolaan perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas pendampingan partisipatif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa serta dampaknya terhadap transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RKPDES di Desa Babussalam.

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu; (1) Meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun RKPDES yang berbasis partisipatif dan transparansi. (2) Memberikan pendampingan kepada aparatur desa dalam memahami prinsip-prinsip perencanaan desa yang sesuai dengan regulasi dan kebutuhan masyarakat. (3) Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan RKPDES agar dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat Desa Selebung. (4) Mengembangkan model pendampingan yang dapat direplikasi di desa lain dalam meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan desa. Dengan pendekatan ini, diharapkan aparatur desa dapat menyusun RKPDES yang lebih berkualitas, transparan, dan partisipatif, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

Metode

Metode yang digunakan dalam program pengabdian ini adalah *Participatory Action Research* (PAR) dan Pendampingan Partisipatif Berbasis Transparansi. Metode PAR dipilih karena melibatkan partisipasi aktif aparat desa dan masyarakat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Pendampingan partisipatif berbasis transparansi digunakan untuk memastikan bahwa proses perencanaan bersifat inklusif, akuntabel, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Sasaran utama program ini adalah aparat desa di Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, yang terdiri dari:

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Tim Penyusun RKPD
4. Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Kelompok Masyarakat

Pelaksanaan program ini terdiri dari beberapa tahapan utama:

1. Tahap Identifikasi dan Pemahaman Masalah yang terdiri dari:
 - a. Observasi awal terhadap kondisi penyusunan RKPD di Desa Selebung.
 - b. Diskusi awal dengan aparat desa dan masyarakat untuk memahami permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan desa.
 - c. Pengumpulan data sekunder terkait perencanaan pembangunan desa sebelumnya.
2. Tahap Pelatihan dan Pendampingan
 - a. Pelatihan mengenai prinsip-prinsip perencanaan desa yang partisipatif dan transparan.
 - b. Pendampingan teknis dalam penyusunan RKPD berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
 - c. Simulasi dan praktik langsung penyusunan RKPD yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
3. Tahap Implementasi dan Monitoring
 - a. Penyusunan draft RKPD oleh tim desa dengan bimbingan fasilitator.
 - b. Forum konsultasi dan validasi dengan masyarakat untuk memastikan keterwakilan dan transparansi.
 - c. Evaluasi proses penyusunan RKPD, dengan menilai efektivitas pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data dalam melaksanakan kegiatan pengaduan kepada masyarakat ini yaitu:

1. Teknik Pengumpulan Data
 - a. Wawancara mendalam dengan aparatur desa dan masyarakat.
 - b. Diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) untuk menggali aspirasi masyarakat.
 - c. Kuesioner untuk mengukur pemahaman aparatur desa sebelum dan sesudah pelatihan.
 - d. Observasi langsung dalam penyusunan RKPDES.
2. Teknik Analisis Data
 - a. Analisis deskriptif untuk mengevaluasi perubahan kapasitas aparatur desa.
 - b. Analisis komparatif antara kondisi sebelum dan sesudah pelatihan dan pendampingan.
 - c. Evaluasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDES berdasarkan indikator transparansi dan inklusivitas.

Metode ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun RKPDES yang berbasis partisipasi dan transparansi, sehingga pembangunan desa lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan

2.1 Kondisi Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyusunan RKPDES

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan aparatur desa di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, ditemukan bahwa pemahaman mereka terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDES) masih terbatas. Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang mengatur perencanaan desa, keterbatasan dalam menyusun dokumen perencanaan yang sistematis, serta minimnya keterampilan teknis dalam menggunakan teknologi informasi untuk mendukung penyusunan RKPDES.

Dalam proses penyusunan RKPDES, partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum utama dalam menampung aspirasi masyarakat sering kali hanya dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa dan tokoh masyarakat tertentu, tanpa keterlibatan luas dari kelompok-kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi belum sepenuhnya diterapkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan desa.

2.2 Efektivitas Pendampingan Partisipatif dalam Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pendampingan partisipatif dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pelatihan teknis, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta bimbingan langsung dalam penyusunan RKPDES. Pelatihan teknis diberikan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa terkait regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, aparatur desa juga diberikan pelatihan dalam menyusun dokumen RKPDES secara sistematis dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Hasil dari pendampingan ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam kapasitas aparatur desa. Aparatur desa yang sebelumnya kurang memahami struktur RKPDES kini mampu menyusun dokumen perencanaan yang lebih sistematis dan berbasis data. Selain itu, melalui pendekatan diskusi kelompok, keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan RKPDES mengalami peningkatan. Masyarakat mulai lebih aktif menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi pendekatan ini, seperti keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengadakan musyawarah yang lebih inklusif. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan, seperti program pelatihan berkala dan pendampingan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil.

2.3 Peran Transparansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa

Transparansi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam penyusunan RKPDES, prinsip transparansi diterapkan dengan mempublikasikan dokumen perencanaan secara terbuka melalui papan informasi desa dan media sosial resmi pemerintah desa. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi terkait program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dari hasil evaluasi, penerapan transparansi dalam proses perencanaan desa berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan kini lebih aktif dalam memberikan masukan dan mengawasi pelaksanaan program yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat lebih proaktif dalam mengawal pembangunan desa yang lebih inklusif dan akuntabel.

Namun, masih diperlukan penguatan dalam aspek pengelolaan informasi agar transparansi dapat berjalan lebih efektif. Beberapa kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi digital serta kurangnya pemahaman

sebagian aparatur desa dalam mengelola dan menyajikan informasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih sistematis dalam membangun mekanisme transparansi yang lebih efektif, seperti penyediaan forum komunikasi langsung dengan masyarakat serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memanfaatkan teknologi informasi.

2.4 Implikasi Temuan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pendampingan partisipatif efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menyusun RKPDES serta mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, penerapan transparansi dalam perencanaan desa berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan.

Untuk memastikan keberlanjutan dari upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

1. **Peningkatan Program Pelatihan Berkelanjutan** – Pemerintah desa perlu mengadakan pelatihan rutin bagi aparatur desa dalam hal perencanaan pembangunan, manajemen keuangan desa, serta pemanfaatan teknologi informasi.
2. **Penguatan Mekanisme Partisipasi Masyarakat** – Pemerintah desa harus lebih proaktif dalam melibatkan masyarakat melalui musyawarah yang lebih inklusif, serta menyediakan platform komunikasi yang lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. **Optimalisasi Sistem Transparansi Informasi** – Perlu adanya sistem informasi yang lebih terstruktur untuk menyampaikan dokumen perencanaan desa kepada masyarakat, baik melalui media digital maupun forum tatap muka secara berkala.

Dengan penerapan strategi-strategi ini, diharapkan proses penyusunan RKPDES di Desa Babussalam dapat menjadi lebih partisipatif, transparan, serta berdampak positif bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Kepala Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah beserta jajaran pemerintah Desa Selebung yang telah meluangkan waktu dan bekerjasama sehingga program pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan lancar. ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi yang telah memberikan bantuan pendanaan untuk terselenggaranya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Referensi

- Vestikowati, E., Endah, K., & Hidayat, E. S. (2020). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Rohman, T. (2020). Analisis Peran Aparatur Desa dalam Penyusunan RKPDes Partisipatif. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 134-142.
- Yuliana, S. (2021). Evaluasi Kinerja Pendamping Desa dalam Pembangunan Partisipatif. Jakarta: Puslitbang Kemendesa PDTT.
- Arma, N. A., Sopang, J., & Jaffisa, T. (2020). Peningkatan Aparatur Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Kota Rantang. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Setiadi, S., Ekawati, H., & Habib, F. (2020). Pelatihan dan Pendampingan bagi Peningkatan Kapasitas Aparat dan Institusi Desa dalam Perencanaan dan Implementasi Pembangunan. *Bakti Budaya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1).
- Suyanto. (2023). Pemberdayaan Aparat Pemerintahan Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Batoboh*, 8(2),
- Wardana, D., & Zainal. (2021). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 1(2),
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa